

TINDAKAN KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN IMORAL DALAM PERSPEKTIF FUNGSIONAL (KAJIAN FILM KORUPSI DAN KITA: RUMAH PERKARA)

Muryanti

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga
newsyant@yahoo.com

Abstrak. Perilaku korupsi dalam perspektif fungsionalisme structural berfungsi sebagai pelumas birokrasi untuk mempercepat sistem birokrasi menjalankan tugasnya. Korupsi merupakan salah satu fungsi melekat dalam fungsi politik dan fungsi ekonomi yang berjalan beriringan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi positif dari korupsi pada sistem politik di film: Korupsi dan Kita: Rumah Perkara. Film ini merupakan salah satu cermin situasi perpolitikan di Indonesia yang sangat rentan dengan perilaku dan tindak pidana korupsi. Metode penelitian adalah kualitatif dengan menganalisis data sekunder film dan menganalisisnya dengan perspektif structural fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi positif dari korupsi benar-benar dijalankan oleh pebisnis untuk mendapatkan keuntungan dari bisnisnya tanpa mempertimbangkan moral dan mengabaikan moral itu sendiri. Perilaku bisnis bekerjasama dengan pejabat dengan melakukan suap untuk menggoalkan tujuannya. Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan maksimal karena kepentingan bisnis dan politik bisa berjalan beriringan. Sisi yang lain, masyarakat banyak menderita karena perilaku korupsi, diantaranya: kehilangan lahan, pekerjaan dan tanah kelahiran.

Kata Kunci: Tindakan Korupsi, Imoral, Amoral dan Struktural Fungsional

Abstract. *Corrupt behaviour, in the perspective of structural functionalism, function as the lubricant of bureaucracy to quicken the bureaucracy system in doing their job. Corruption does have political function as well as economical client which runs simultaneously to gain maximum advantage. This writing is aimed to discover the positive function of corruption in the political system in the movie Korupsidan Kita: RumahPerkara. This movie is one example of political situation in Indonesia which is very vulnerable to corruption. The research method is qualitative by analysing secondary data, which is movie, with structural and functional perspective. The result of the research shows that the positive function of corruption is really done by the businessman to gain advantage towards their business but with ignoring the moral value. In reaching the goal, businessman cooperate with government officers. The two parties get the advantages because business and political importance can actually run together. In the other side, society suffer from this corruption activity for example: losing land, occupation and birthplace.*

Keywords: *corruption, immoral, structural and functional*

PENDAHULUAN

Tindakan korupsi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Tindakan tersebut nampak dalam kehidupan sehari-hari, pun dalam perilaku sosial-politik oleh setiap individu atau yang dikenal pada level

mikro. Banyaknya individu yang melakukan tindakan koruptif menyebabkan tindakan korupsi bersifat kolektif yang membentuk sistem koruptif. Pada level mikro nampak pada perilaku individu yang secara sadar atau pun tidak dipengaruhi oleh sistem sosial untuk bertindak koruptif dengan berbagai



macam bentuknya: sogok menyogok, memberi hadiah ataupun nepotisme yang menggurita. Pada level makro ditandai dengan sistem sosial dan politik yang koruptif yang mewujud dalam demokrasi procedural dalam sistem politik di Indonesia. Menurut Isra (2007) bentuk yang saling mempengaruhi pada level mikro dan makro adalah individu yang melakukan tindakan koruptif beranggapan bahwa praktik korupsi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah karena banyak orang yang melakukannya.

Adanya perilaku individu atau pun sistem yang mengarah pada korupsi menunjukkan bahwa tindakan korupsi memiliki makna yang sangat luas. Menurut Van Doorn dalam Lubis (1988) korupsi tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kemungkinan, dalam mengejar tujuan seseorang atau sekelompok orang untuk membatasi jumlah pilihan bagi orang-orang atau kelompok-kelompok lain dalam menentukan sikap mereka. Kekuasaan yang dimaksud, lebih pada kekuasaan yang dijalankan tanpa ada aturan.

Menurut Alatas (1986) disebut tindakan korup, apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Termasuk dalam definisi ini; SUAP, menawarkan pemberian atau hadiah; PEMERASAN, permintaan pemberian-pemberian dalam melaksanakan pekerjaan publik; penggelapan milik publik. Perilaku suap sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Suap yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang langka dan

menghindari biaya; (2) Suap yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh kebijakan publik; (3) Suap diberikan, tidak untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan dan (4) Suap yang diberikan untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan atau untuk membebaskan biaya pada pihak lain. Menurutnya fenomena korupsi terjadi apabila pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik yang disebut dengan nepotisme. Benang merah yang menyatukan ketiga hal tersebut adalah; penempatan kepentingan publik dibawah tujuan privat dengan pelanggaran norma tugas dan kesejahteraan (bersifat rahasia, pengkhianatan dan penipuan).

Dalam bahasa yang lain Wijayanto (2009) menyatakan bahwa korupsi menurut:

1. Webster Dictionary didefinisikan sebagai:
... immoral conduct or practices harmful or offensive to society atau sinking to a state of low moral standards and behavior....

2. UNDP didefinisikan sebagai :
... the abuse of public office for private gain... dalam arti yang luas, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Korupsi terjadi, jika 3 hal terpenuhi; 1) seseorang memiliki kekuasaan; 2) adanya

economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik dan 3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik

Berdasarkan beberapa definisi tersebut menunjukkan luasnya definisi korupsi, baik pada level mikro ataupun makro. Berdasarkan tipologinya, tindakan korupsi dapat dikategorikan menjadi 2 kategori: (1) *GRAND CORRUPTION* yakni korupsi besar, korupsi yang melibatkan pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan dan keputusan besar yang menyangkut berbagai bidang yang menyebabkan kerugian negara dan (2) *PETTY CORRUPTION* yakni korupsi kecil, yang sering disebut sebagai *survival corruption by needed* yang dilakukan oleh pegawai pemerintah untuk mendukung hidup sebagai akibat dari pendapatan yang tidak memadai.

Secara umum yang dimaknai sebagai tindakan korupsi adalah korupsi dalam makna yang luas (besar) atau disebut *grand corruption* yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang relative besar. Tulisan ini hendak mengkaji tentang tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat public yang merugikan kepentingan negara dalam arti luas,. Pada level ini, korupsi dimaknai sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan bukan kejahatan biasa (*ordinary crime*) ditunjukkan dengan perilaku korupsi sebagai akibat tindakan politik yang dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang relative besar dan menimbulkan bencana perekonomian nasional. Tindak pidana korupsi tersebut juga menyebabkan

terjadinya pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Tindakan Imoral dan Amoral dalam Perspektif Struktural Fungsional

Kajian structural fungsional yang dimaksud dalam tulisan ini mengacu pada sebuah sistem sosial, lebih spesifiknya adalah negara. Menurut Merton, konsep fungsi melibatkan pandangan aktor yang berada di dalam dan di luar sistem. Fungsi sosial menunjuk pada akibat-akibat obyektif yang dapat diamati dan tidak pada kecenderungan subyektif (sasaran, dorongan dan tujuan). Menurut perspektif fungsional, tindakan yang dilakukan oleh seseorang lebih disebabkan akibat-akibat obyektif terkait dengan sistem yang mewadahi individu dan bukan hanya disebabkan oleh dorongan individu semata.

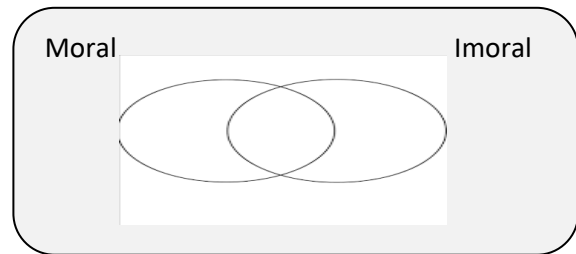
Perspektif structural fungsional membagi dengan tegas tindakan yang tidak berada dalam kerangka sistem structural fungsional itu berbeda dengan sistem. Terkait dengan tindakan korupsi, dalam structural fungsional, sistem dibagi menjadi dua, yaitu (1) sistem yang korup dan (2) sistem yang anti korupsi. Pada kedua sistem menerapkan sistem yang sangat berbeda dan justru berkebalikan dalam menerapkan berlakunya fungsi-fungsi dalam sistem. Pada struktur yang korup, tindakan korupsi sudah menjadi bagian yang melekat dari sistem, sehingga setiap fungsi memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan oleh semua fungsi yang terlibat dalam sebuah sistem, sehingga korupsi menjadi bagian yang melekat dalam sistem yang korup. Apabila seseorang dalam sistem yang korup, tidak melakukan tindakan yang koruptif tentunya akan berada di luar sistem karena menjadi fungsi yang

berbeda. Seseorang justru akan dijauhi, dikucilkan dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pada sistem anti korupsi, tentunya akan berlaku sebaliknya. Tindakan korupsi merupakan salah satu fungsi yang berada di luar sistem yang dibangun. Seseorang yang melakukan tindakan korupsi pada sistem anti korupsi, tentunya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya, sekecil apa pun tindakan korupsi tersebut. Sebagaimana pernyataan Merton yang menerangkan bagaimana faktor-faktor sosial dan struktural menyebabkan beberapa orang menempuh jalan menyimpang dari norma, yaitu memperoleh kekayaan melalui tindak kejahatan. Dalam kasus korupsi, tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan dalam hukum positif.

Lantas bagaimana hubungan antara amoral, moralitas dan imoral ?. Merton menjelaskan konsep amoral sebagai tindakan yang tidak mengenal moral. Sisi lain, konsep imoral sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral. Amoral menunjukkan tindakan yang tidak memiliki moral, pada kenyataannya menentang moralitas. Ia menyimpang dari asas-asas moral masyarakat. Istilah amoral menunjuk unsur yang tidak berpihak (netral), sedangkan imoral tidak netral karena berhimpitan dengan konsep moral. Pada sistem anti korupsi, tindakan korupsi dikatakan sebagai tindakan yang amoral. Pada sistem yang korup, tindakan korupsi merupakan tindakan imoral karena tindakan tersebut hanya menyimpang dari tindakan moral sebagai sistem yang diterapkan dalam masyarakat. Terkait dengan adanya fungsi manifest dan fungsi laten yang diterapkan oleh aktor dalam sistem struktural fungsional.

Diagram 1: Posisi Moral dalam Fungsional Struktural Korup



Korupsi sebagai tindakan imoral yang berada dalam sistem, berhimpitan dengan moral

Diagram 2 : Posisi Moral dalam Fungsional Struktural Antikorup



Korupsi sebagai tindakan amoral yang berada di luar struktural fungsional

Pada sistem sosial yang korup, Merton sama sekali menyingkirkan kategori moral dari analisa dan mengaburkan perbedaan kualitatif dalam proses sosial. Ia memandang fungsi mesin politik yang korup sebagai proses integratif untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertentangan yang tujuannya dipenuhi oleh mesin tersebut. Mesin fungsionalisme juga melayani kejahatan, kedurhakaan dan kriminal. Korupsi berfungsi positif dalam birokrasi sebagai bagian dari sistem untuk melancarkan semua fungsi dalam sistem.

Hal ini semata-mata terjadi dari tidak disertakannya acuan moral dalam analisis struktural fungsional yang menekankan bahwa setiap usaha baik yang absah ataupun tindak kejahatan itu semata-mata bersifat ekonomi. Dalam analisis mesin fungsional, terdapat fungsi laten sebagai praktik atau keyakinan dari akibat-akibat sosial dan psikologis yang tidak dikehendaki dan biasanya tidak diketahui. Fungsi struktural yang terpokok adalah mengorganisasi, memusatkan dan memelihara kondisi kerja yang baik bagi berbagai potongan kekuasaan yang terpisah-pisah dalam sebuah organisasi. Pada analisa penyulingan ini, sangat diabaikan, apakah seorang pemimpin itu bajingan atau warga negara yang memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan aktor menjalankan fungsi positif bagi mesin organisasi. Atau kalau pun aktor tersebut merugikan organisasi, namun tetap memenuhi fungsi laten dari organisasi.

Seorang aktor atau pemimpin dalam mesin fungsionalisme yang korup, bisa memerankan fungsi laten sebagai fungsi manifest. Merton menyebutkan bahwa analisa fungsionalisme sistem yang korup mampu mengatasi paradoks dari unsur pemimpin yang baik dan pelaku kejahatan untuk duduk berdampingan dalam sistem yang sama. Mengingat mesin tidak membedakan aktor-aktor untuk saling bertemu. Pemimpin adalah aktor atau pihak lain diantara dua aktor tersebut yang memelihara dan mengintegrasikan keduanya. Walaupun mereka bipolar, akan tetapi fungsi tersebut memadukan keinginan dan maksud pribadi untuk memenuhi kebutuhan. Fungsi keduanya disebut sebagai fungsi nihilistik karena tidak ada kualitas moral yang melekat padanya.

Pada mesin fungsional, aktor berperan sebagai fungsi humanisasi dan personalisasi dari mesin dengan memberi bantuan kepada aktor yang lain. Dalam persaingan antara berbagai struktur yang membutuhkan aktor untuk memenuhi fungsi yang secara nominal sama yaitu menempati fungsi untuk menggerakkan mesin fungsionalisme itu sendiri, sistem ini membutuhkan pemimpin yang merupakan aktor yang terintegrasi dengan kelompok-kelompok yang dilayani dibandingkan dengan aktor lain yang lebih impersonal, profesional dan secara sosial-hukum memiliki banyak kendala. Pemimpin dan mesin fungsional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian sebagai lokomotif mesin fungsional.

Merton menolak mesin fungsionalisme yang bersifat korup itu adalah korup. Dia menjelaskan adanya fungsi laten tidak memungkinkan dimasukkannya penilaian moral yang naif sebagai ganti analisa sosiologis. Mengingat penilaian moral dalam masyarakat cenderung dalam rangka akibat-akibat yang manifest dari suatu praktik, sehingga fungsi laten bertentangan dengan norma yang berlaku. Bila ada fungsi laten dalam mesin, dimana fungsi tersebut seharusnya diberi penilaian moral lain dari fungsi manifest. Bagi sebuah sistem, cara mengklasifikasikan apakah suatu tindakan berfungsi sesuai dengan tujuannya atau untuk tujuan lain yang tidak diinginkan oleh tujuan aslinya. Tujuan laten dibalik tujuan yang tampak tidak ada bagi organisasi.

Tatkala para aktor menggunakan mesin sebagai alat penyelewengan atau pemerasan, motivasi mereka yang laten yang menuntut pengungkapan dalam bentuk pemerasan dan penyelewengan yang konkrit adalah termasuk spektrum moral yang sama

dan harus dinilai dalam kerangka akibat yang manifest. Fungsionalis yang korup memperkenalkan penilaian moral (dalam kaitannya dengan imoral) dengan mencoba menghapus perbedaan antara fungsi moral dan imoral dalam analisa terhadap lembaga sosial. Dengan menggunakan istilah positif dan negatif untuk menggantikan baik dan buruk, moral dan imoral berarti mengaburkan persoalan karena positif dan negatif menunjuk pada kriteria yang tidak memiliki konsistensi moral, padahal masalah manusia yang meluas di dalam perjalanan sejarah selalu berkaitan dengan eksploitasi yang disertai dengan ketidakadilan, kekejaman dan kejahatan.

Tindak kejahatan yang tersistem dalam sebuah mesin structural fungsional yang korup menunjukkan menguatnya tindakan korupsi sebagai sebuah ideologi dalam sebuah sistem. Dukungan terhadap ideologi korupsi nampak dengan adanya pernyataan bahwa korupsi merupakan lembaga ekstra legal yang digunakan oleh perorangan atau kelompok untuk memberikan pengaruh terhadap tindakan birokrasi. Sebagai adanya, kehadiran korupsi hanya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut ikut serta dalam pengambilan keputusan sampai ke batas yang lebih jauh. Pernyataan tersebut mengandung penilaian, terkait dengan adanya transmudasi ilegal menjadi ekstra ilegal. Penggunaan kata ekstra ilegal merupakan pergeseran nilai moral yang menyebabkan koruptor merasa senang dengan perilakunya. Bahkan korupsi dianggap sebagai lembaga sosial. Tokoh-tokoh koruptif akan menegaskan bahwa terjadi tindakan korupsi jika tidak ada penyuapan, maka kegiatan perekonomian dan pembangunan tidak berjalan sesuai target, misalnya : tidak ada perusahaan

minyak dan gas yang beroperasi secara baik. Tentunya anggapan sebaliknya pada sistem yang anti korupsi, anggapan tersebut adalah omong kosong, karena jika tidak ada korupsi tentunya tidak ada biaya lebih yang harus dibayarkan perusahaan

Apa yang tidak disadari oleh fungsionalis korupsi atau sistem yang korup adalah mereka tidak memiliki pengalaman hidup di dalam masyarakat yang korup, mereka tidak merasakan penderitaan korban korupsi, mereka tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang negara-negara yang menjadi korban korupsi. Penggunaan sistem oleh kelompok penyuap yang besar dan terorganisir seperti dalam kejahatan sama sekali tidak dianggap fungsional secara positif karena bertentangan dengan kepentingan umum. Penyuapan secara politis pada hakikatnya merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para penyuap yang terorganisir untuk membayar para wakil rakyat untuk mengkhianati rakyat.

Filsafat fungsional korupsi yaitu menerima posisi usaha yang korup sebagai sesuatu yang wajar. Keuntungan merupakan kepentingan utama, walaupun dilakukan dengan topeng atau kedok pembangunan. Fungsi ideologisnya adalah suatu campuran antara pragmatisme, relativisme nilai, nihilisme (lebih mengutamakan metode dibandingkan dengan subyek yang dikaji) dan melemahkan semangat untuk melawan korupsi karena membungkusnya dengan kehormatan ilmiah semu. Fungsionalisme korupsi membawa ke arah skeptisisme moral yang sempurna, mengabaikan persaingan bisnis yang sehat. Fungsi fungsionalisme korupsi adalah mempertinggi semangat orang yang korup, membantu pembentukan ideology korupsi, memperparah kekeroposan landasan nilai-nilai luhur, menimbulkan keraguan pada

nilai dan kemungkinan bagi adanya pemerintahan yang jujur. Korupsi merupakan iblis pembela terhadap tindakan korupsi yang maju dan sumber penindasan terhadap umat manusia selama bertahun-tahun.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data Sekunder (kadang disebut singkat dengan Metode Penelitian Sekunder) merupakan salah satu metode penelitian. Oleh karena namanya yang berbunyi “analisis data sekunder” sering kali disalahpahami sebagai teknik menganalisis data sekunder. Analisis Data Sekunder itu metode penelitian juga. Artinya ada prosedur pengumpulan data dan analisis data. Namun demikian tidak semua definisi tentang Analisis Data Sekunder menunjukkannya sebagai duatu metodem penelitian. Hakim (1982:1; dinukil Johnston, 2014:620), misalnya, merumuskan Analisis Data Sekunder itu sebagai “*any further analysis of an existing dataset which presents interpretations, conclusions or knowledge additional to, or different from, those presented in the first report on the inquiry as a whole and its main results*” (analisis lebih lanjut himpunan data yang sudah ada yang memunculkan tafsiran, simpulan atau pengetahuan sebagai tambahan terhadap, atau yang berbeda dari, apa yang telah disajikan dalam keseluruhan dan temuan utama penelitian terdahulu atau semula).

Heaton (2004:16; dinukil Andrews, et.al., 2012:12) merumuskan analisis data sekunder (ASD) itu sebagai “*a research strategy which makes use of pre-existing quantitative data or pre-existing qualitative*

data for the purposes of investigating new questions or verifying previous studies.” Jadi, analisis data sekunder, menurut Heaton, merupakan suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu. Sebutan strategi penelitian itu setara dengan sebutan metode penelitian. Johnston (2014:620) menegaskannya dengan menyatakan bahwa “*Secondary data analysis remains an under-used research technique in many fields Given the increasingly availability of previously collected data to researchers, it is important to further define secondary data analysis as a systematic research method.*” Analisis data sekunder itu masih tetap sebagai teknik penelitian yang jarang digunakan di berbagai bidang. Dengan semakin banyaknya data hasil penelitian yang tersedia untuk dimanfaatkan para peneliti, maka sangat penting untuk kemudian menegaskan analisis data sekunder itu sebagai metode penelitian yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Film Korupsi : Rumah Perkara

Film berjudul *Kita Versus Korupsi* (KvK) *Rumah Perkara* ini menceritakan berbagai elemen masyarakat yang terlibat dan terkena dampak dari perilaku korupsi. Sangat jelas untuk dibaca bahwa film ini berlatar sistem korup yang dianut oleh suatu negara. Struktural fungsionalnya kemudian berlaku pada sistem yang korup dengan berbagai macam perilaku moral dan imoral berhimpitan yang diperankan oleh aktor.

Alur cerita film ini bermula dari percakapan antara dua pejabat negara bernama Yatna (kepala desa terpilih) dengan Investor (Jaya). Perbincangan dilakukan melalui telfon genggam. Intinya, seorang Investor mengucapkan selamat atas terpilihnya Yatna menjadi perangkat desa.

Jaya : “yaaa. selamat buat kemenangan anda Pak Yatna.”

Yatna : “wah,, Saya gak boleh takabur Pak,”

Jaya : “Besok kan saya harus ke luar negeri Pak Yatna. Tapi gak papa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat yah.. dan sukses tahun-tahun ke depan.

Yatna : “Saya.. gak tahu harus berterimakasih seperti apa,”

Jaya : “Gak usah, Gak usah berterimakasih kepada saya. Pak Yatna tahu sendiri lah. Ya sudah oke..

Pada saat kampanye pemilihan kepala desa, Pak Yatna mengkampanyekan bahwa apabila dirinya terpilih, ia akan memperjuangkan hak-hak rakyatnya.

Isi kampanye Yatna:

“Tujuan saya ini mulia. makanya saya berada di sini bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji posyandu akan kita perbaiki bapak-bapak. Mushola akan kita perindah, ternak-ternak, pupuk-pupuk akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Ya itu janji saya.” Begitu cuplikan kampanye Yatna menjelang pencalonan Kepala Desa. Hal ini disambut baik bahkan tepuk tangan warga ikut memeriahkan suasana kampanye Yatna. Akhirnya Yatna pun terpilih menjadi Kepala Desa.

Pada suatu hari, saat Yatna ingin berangkat ke Kantor Kepala Desa, ia ditanya oleh anak laki-laknya bernama Iqbal yang kira-kira berusia 8 tahun. Sambil memegang pistol-pistol yang di arahkan ke punggung Yatna, Iqbal bertanya:

Iqbal : “Lho.. bapak koq belum mati.

Yatna : “Kan belum kamu tembak,”

Iqbal : “Bapak ini **jagoan apa penjahat?**”

Yatna : “Bapakmu ini.. Lawan kamu atau musuh kamu?”

Pertanyaan Iqbal terhenti ketika ibunya keluar memanggilnya. Ibunya menyuruhnya untuk istirahat. Karena anaknya ijin untuk tidak berangkat sekolah karena sakit. Yatna melanjutkan perjalanannya menuju ke kantor kepala desa. Di tengah-tengah perjalanannya, ia melihat sekeliling rumah warga. Yatna teringat dengan ucapan investor:

“Kalau rumah-rumah di belakang kabut itu sudah rata dengan tanah, kita akan bangun, *real estates*, rumah-rumah besar, ruko-ruko, kafe-kafe dan hamparan tanah yang luas itu kita akan bangun *sport center*, masjid dan lapangan golf. Biar presiden bisa main di sana.”

Terlihat saat melintasi jalan, ada salah satu warga yang sedang mengangkut barang-barangnya. Sepertinya ia ingin pindah ke tempat lain. Mengangkut barang-barang rumah tangganya seperti kursi, kasur, meja dan lainnya menggunakan mobil terbuka (colt). Di sisi lain, Iqbal sedang bermain pistol-pistol sendiri di tengah-tengah hutan pinus. Tidak ada anak kecil lain selainnya.

Dalam cerita ini, terlihat adanya konflik agraria atau persengketaan lahan antara atasan dari Kepala Desa dengan salah satu penduduk setempat. Satu penduduk yang menolak digusur ialah seorang janda namanya Ella. yang ternyata merupakan selingkuhan dari Kepala Desanya sendiri (Yatna).

Jayan : “.....Bagaimana mungkin hal ini terjadi, kalau masih ada satu rumah janda itu yang menghalangi,”

Pekerja : “Masalah janda itu akan saya segera selesaikan pak,”

Jaya : “Kapan?”

Pekerja : “Secepatnya pak,”

Jaya : “Kapan?,

Pekerja : “Secepatnya pak.

Sementara di ruang Kepala Desa, orang suruhan investor menemui Yatna. Menyerahkan berkas-berkas dengan tujuan supaya Yatna selaku Kepala Desa mempercepat penggusuran untuk satu rumah milik Ella.

Pekerja : “Di sini tanggalnya sudah jelas Pak. Kapan bulldozernya masuk ke kampung ini. Dan surat ini juga telah ditandatangani oleh Pak Camat,”

Yatna : “Koq cepet sekali ya mas?.”

Pekerja : “Pak Lurah tahu sendiri lah, rencana Pak Jaya itu kan sudah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dubuatnya besok. Jadi sebelum bulldozernya datang, Bapak masih punya waktu untuk mendapatkan surat tanah janda itu. Kata Pak Jaya,, jadi petani zaman sekarang ini serba susah pak. Hujan gak datang-datang. Bibit pada jelek, pupuk gak selalu ada, sudah begitu,

harga jual gabah saat ini murah banget pak,”

Percakapan ini ditutup dengan penandatanganan dokumen persetujuan dari Pak Yatna kepada utusan dari Pak Jaya (atasannya).

(Di rumah Ella)

Ternyata, saat Iqbal bermain sendirian, ia bertemu dengan Ella. Sehingga, Ella mengajaknya untuk ikut menemaninya pergi ke pasar dan Iqbal dibelikan mainan oleh Ella. Kemudian ia diajak bermain ke rumah Ella. Rumah di tengah-tengah hutan pinus dan satu-satunya yang tidak mau digusur oleh investor. Saat ia berpamitan pulang, ia bertemu dengan ayahnya di depan pintu rumah. Yatna selaku Kepala Desa setempat datang ke rumah Ella (Janda yang rumahnya masih belum bisa digusur) dengan tujuan untuk menyuruh Ella segera meninggalkan rumah tersebut. Ella yang masih terlihat muda itu merupakan selingkuhan dari Yatna itu sendiri. Terjadi perbincangan di rumah Ella dengan Yatna.

Yatna : “Maksudmu apa El..”

Ella : “gak ada maksud apa-apa. Tadi tu, aku lagi jalan ke pasar. Terus aku lihat Iqbal lagi main sendirian. Kan kasihan dia. Ya udah aku ajak aja dia ke pasar. Lagian, gak ada salahnya kan aku beliin dia mainan. Biar dia punya temen lagi,”

Di tengah-tengah perbincangan, Yatna mengambil tas baju dan menyuruh Ella untuk segera pergi.

Yatna : “Ayo, sekarang aku bantuin kamu beresin barang-barang. Sore ini juga, kamu harus pergi dari sini. Karena besok pagi, bulldozernya akan datang,”

Ella : “Bukannya kamu udah janji,”

Yatna : “Maafin aku el,”

Dengan nada tinggi Ella membentak dan memberi penegasan kepada Pak Yatna:

Ella : “Yatna!! kalau ada yang gangguin rumahku lagi, dan kamu gak belain aku, aku gak main-main. Istrimu bakal tau!”

(Sementara, suruhan Pak Jaya di Warung Kopi bersama dengan kedua temannya)

Pekerja I : “Kamu kan tau sendiri, Di kasih uang dia nolak. Ditakut-takutin gak kena. Di teror gak berhasil. Emang anjing tu janda.

Pekerja II : “Padahal sudah kita ancem bakal gilir.... Tapi... Yah...”

Pekerja : “Awat aja bila kalian gilir beneran. terus ancemannya ke polisi,”

Pekerja II : “Pengennya si kang,,,”

(Refleks pekerja menyiramkan air ke salah satu temannya sambil berteriak,,)
“GOBLOK!!”

(Sementara di rumah Pak Yatna)

Istrinya Yatna, sedang menasehati Iqbal (anaknyanya). Mengingat menurut pengakuannya Iqbal hari ini merasa tidak enak badan. Namun malahan main-main seharian. Ia pun di tanya dengan siapa ia bermain serta dari mana mainan baru yang ia dapatkan. (mainan yang Iqbal dapat dari Ella). Iqbal mengeluh akan sepihnya kehidupan di sekitar. Apalagi dengan tidak adanya teman-temannya. Menurutnyanya, teman-temannya sudah pergi semua meninggalkan kampung sekitar. Tidak lama kemudian, *Hand Phone* ibunya Iqbal berdering. Ternyata, Yatna yang merupakan suaminya menelfon. Ia pun menanyakan keberadaan Iqbal serta keadaannya. Sang istri pun menasehati suaminya,

Istri : “Kang, temen-temennya Iqbal udah pada pergi semua. Kasian, Iqbal main sendiri terus. Kang, jadi lurah itu, harus melindungi warganya. Yang susah dibantu. yang sakit diobati,”

Yatna : “Bu,, kamu juga mau ikut-ikutan nyalahin aku. itu bukan buat aku,,”

Istri : “Buat siapa kang, kamu jadi lurah itu buat siapa?. Bagaimana warga melihat keluarga kita. Aku hanya mikirin Iqbal kang,,

Yatna : “Kamu itu gak tau,, ini buat kamu... buat Iqbal,”

Pembicaraan melalui *Hand Phone* pun di sudahi.

Pak Yatna kembali menemui Ella dan menegaskan kembali bahwa malam hari itu, Ella sudah harus pergi meninggalkan rumahnya.

Ella : “Dulu, kau bilang gak ada yang bisa mengambil rumahku. Kau bakal ngelindungi aku. Rumah ini hak ku. Engkau pasti belainnya.

Yatna : Aku sudah memutuskan, kau harus pergi dari sini.

Ella : “Aku selalu ngendelin kamu Yatna. Dari dulu sampe sekarang aku percaya, kalo kamu bakal ngelindungin aku. Emangnya kamu berani bawa aku?”

Yatna : “El.. aku gak bisa lagi El.. Harusnya kamu bisa ngertiin posisi aku,”

Ella : “Posisi? Kamu ngerti gak posisiku?. Ha! Aku janda ditinggal mati suami!. Aku sendiri! Cuma ini yang aku punya. Kamu!. Kamu punya istri, anak dan jabatan!. Gak usah munafik kamu! (sambil memegang surat tanah), Ini!, ini surat-surat yang kamu mau.

Yatna mengambil surat-surat tanah rumah Ella yang terlempar di lantai. Dengan penuh pertimbangan, Yatna membawa surat-surat itu dan kemudian pergi meninggalkan Ella. Di lain tempat, orang suruhannya Pak Jaya mendapat desakan dari pak jaya melalui telfon untuk segera menyelesaikan urusannya dengan Ella. Dia tidak mau tau, karena hari esok rumah Ella harus menjadi milik pemerintah.

Di tengah-tengah kebimbangan itu, Yatna sampai malam belum juga pulang. Membuat istrinya dan Iqbal sebagai anaknya merasa risau. Pada saat beberapa kali ditelfon, Yatna tak kunjung mengangkat telfonnya, Iqbal pun memutuskan untuk pergi mengunjungi ayahnya menuju ke rumah Ella. Rumah yang tadi siang Iqbal datang usai bermain. Padahal, Yatna memang sedang mengalami kebimbangan, dan dia memilih untuk menenangkan dirinya dan berada di warung kopi tidak jauh dari rumahnya.

Di rumah Ella, terjadi suasana genting. Orang suruhan Jaya bersama kedua temannya yang seperti preman memaksa masuk ke dalam rumah. Namun dengan usahanya Ella berhasil untuk menutup pintunya rapat-rapat sehingga orang suruhannya Pak Jaya tidak berhasil memasuki rumah.

Tidak kurang akal, ketiga orang suruhan dari Pak Jaya akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Ella dengan menggunakan bensin. Rumah Ella pun akhirnya terbakar. Kebingungan melanda pikiran Ella. Dia hanya bisa menangis dan memilih untuk melihat foto-foto keluarga. Saat itu juga, Iqbal yang baru saja sampai di rumah Ella memaksa masuk ke rumah di tengah-tengah

kobaran api. Begitu mendengar kabar terbakarnya rumah Ella, Yatna merasa kecewa dan memilih beranjak dari tempat duduknya di warung kopi menuju mobil dinas. Ia pun merenungi janjinya dahulu. *“Tidak ada yang aku inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Itu janju saya, Demi Allah!!! Saya berjanji”*.

Tindak Korupsi dalam Rumah Perkara sebagai Bentuk Tindakan Imoral

Rumah Perkara menggambarkan struktural fungsional yang korup. Perilaku koruptif diperankan oleh mayoritas semua aktor yang terlibat dalam kekuasaan. Sebagaimana pernyataan Alatas bahwa tindak pidana korupsi berpealung besar terjadi dalam lingkaran kekuasaan. Cerita di dalamnya melibatkan aktor dari kepala desa, pejabat kecamatan, investor dan masyarakat yang berpandangan bahwa perilaku korupsi merupakan perilaku yang dimaklumi dan bukan merupakan kejahatan luar biasa dalam masyarakat. Sisi yang lain, mayoritas masyarakat merasakan dampak dari tindakan korupsi, misalnya kehilangan lahan, kehilangan tempat tinggal, tidak adanya ganti rugi yang tidak setimpal dan kemiskinan yang melilit tidak terpecahkan.

Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dalam sebuah sistem yang korup, melibatkan rantai kekuasaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tindakan ini tidak bisa dilakukan oleh satu aktor, akan tetapi seorang aktor akan menyeret atau melibatkan aktor lain untuk terpaksa atau pun secara suka rela melakukan tindak korupsi. Seorang kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi, bisa dipastikan akan melibatkan aktor lain untuk melakukan tindakan yang sama. Aktor tersebut diantaranya, birokrasi kecamatan,

kabupaten dan masyarakat yang akan melakukan relasi dengan pihak pemerintahan mempersiapkan diri untuk terlibat dan menjadi korban dari tindakan koruptif tersebut. Dalam pembacaan lain, tindakan perilaku kepala desa tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh birokrasi pemerintahan atau pun masyarakat yang koruptif. Tindakan korupsi merupakan siklus dan sistemik.

Dari awal proses berkuasa, pada saat kampanye pemilihan menjadi kepala desa, Yatna melakukan tindakan koruptif dengan memberikan janji-janji manis kepada masyarakat yang memilihnya dengan modal yang tidak kecil. Yatna juga berjanji melaksanakan pembangunan fisik seperti mushola dan posyandu akan ia laksanakan apabila dirinya terpilih. Hal ini berbanding balik sesudah Yatna terpilih menjadi Kepala Desa. Faktanya, bukan kesejahteraan yang terjadi pasca Yatna terpilih, namun sebaliknya. Tidak sedikit warga yang pindah dari desa tersebut akibat akan diadakannya pembangunan seperti *Real Estate, Sport Center* oleh seorang Investor. Tidak berselang lama, beberapa warga desa sekitar pergi meninggalkan kampung halamannya. Iqbal yang merupakan anak laki-laki Yatna merasa kesepian karena beberapa teman bermainnya telah pergi dari desa. Kepergian warga tersebut tanpa alasan. Mereka menjadi korban pengusuran dari investor yang datang ke desa.

Yatna mengalami sebuah dilema dalam dirinya sebagai seorang pemimpin di desa tersebut. Menurut Merton, dalam struktur yang korup, seorang aktor akan memerankan fungsi laten dan manifest secara bersamaan. Sebagai seorang pemimpin dengan citra yang baik, Yatna akan menampilkan fungsi manifestnya dengan menjadi pengayom bagi warganya.

Dia berusaha meyakinkan warganya bahwa dia akan melindungi warga dan menyatakan bahwa kedatangan investor tersebut bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Sisi yang lain, Yatna akan memunculkan fungsi latennya dengan membenarkan tindakan koruptif yang dilakukan oleh investor tersebut, mengingat rasionalitas instrumen. Terkait dengan biaya kampanye yang dibutuhkan untuk berkuasa tidaklah kecil. Pada sistem yang korup, pada akhirnya Yatna menerima tawaran yang diberikan oleh investor tersebut dengan sejumlah uang sebagai balasan diperbolehkannya investasi di desa.

Tindakan koruptif yang dilakukan oleh Yatna dalam perspektif struktural fungsional yang korup sudah sangat jelas sebagai tindakan imoral, bukan berarti amoral (tidak punya moral). Tindakan koruptif hanyalah tindakan yang menyimpang dari perilaku yang seharusnya, akan tetapi tidak dilarang, mengingat fungsinya sebagai pelicin dari birokrasi yang korup itu sendiri. Siapakah yang memulai tindakan koruptif, apakah Yatna sebagai kepala desa ataukah Jaya sebagai investor. Tentunya pertanyaan ini ibarat pertanyaan “dulu mana telur dan ayam”, yang sulit dicari jawabannya. Sama halnya dengan sistem koruptif sebagai sebuah sistem saling mempengaruhi satu sama lain yang tidak bisa dijawab siapakah yang mengawalinya.

Struktur yang korup tersebut tidak hanya berdampak pada para pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang yang melakukan tindakan koruptif. Masyarakat dalam skala yang luas juga menjadi dampak dari sistem ini. Mereka dalam berperilaku kepada atasan akan dengan mudah melakukan tindakan suap dengan prinsip menyenangkan pejabat (ABS= Asal Bapak

Senang) untuk menggoalkan keinginannya. Pejabat pun akan merasa tersanjung dengan kedudukannya yang akan menunjukkan sifat manifestnya sebagai pemimpin baik yang mengayomi rakyatnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yatna.

Sisi yang lain, masyarakat menjadi korban dari tindakan koruptif pada sistem yang korup. Struktural fungsional yang korup tidak akan memberikan peluang kepada aktor yang tidak korup atau menjadi penghambat tindakan koruptif bisa bertahan. Aktor ini akan disingkirkan karena menjadikan sistem tidak seimbang dan cenderung membuat kekacauan. Pada film ini digambarkan bagaimana seseorang yang paling dekat dengan pejabat pun menjadi korban sistem. Sebagaimana yang terjadi pada Ella, selingkuhannya Yatna yang menolak digusur rumahnya untuk pembangunan dengan berbagai macam alasan. Menurut Ella, tanah yang dimilikinya merupakan harta paling berharga warisan orang tua yang harus dijaganya. Hubungannya dengan Yatna selama ini diharapkan mampu memberikan perlindungan untuk menjaga tanah tersebut. Namun, walaupun Ella merupakan orang terdekat Yatna, dia tetap tidak bisa membelanya. Ia mendapat desakan dari investor untuk segera menyingkirkan Ella dari rumahnya supaya pembangunan bisa segera dilakukan. Pihak investor bahkan memiliki satu orang suruhan dan kemudian dua orang bawahannya lagi (total : 3) untuk bertugas membujuk Ella supaya segera pergi dari rumahnya. Berbagai cara telah dilakukan, dari mengiming-imingi sejumlah uang sampai dengan cara yang sangat kasar. Sampai akhirnya, orang suruhan investor memutuskan untuk membakar rumah Ella. Tamatlah riwayat Ella dengan terbakar dia di kobaran api rumahnya sendiri.

KESIMPULAN

Bangunan sistem yang koruptif akan membentuk aktor yang berada didalamnya sebagai fungsi yang korup untuk melanggengkan fungsi itu sendiri. Seorang aktor yang menjadi bagian dari fungsi akan memerankan fungsi laten dan manifest secara bersamaan demi berjalannya sebuah sistem. Tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat yang memegang kekuasaan dan masyarakat bukan disebut tindakan yang amoral (tidak bermoral) akan tetapi hanya disebut sebagai tindakan imoral (menyimpang) dari moral. Pada hakikatnya tindakan korupsi bermanfaat untuk melicinkan birokrasi sebagai pilar sistem korup. Penelitian ini adalah penelitian yang memang menghadirkan teks sebagai data primer himpunan data yang sudah ada yang memunculkan tafsiran, simpulan atau pengetahuan sebagai tambahan terhadap, atau yang berbeda dari, apa yang telah disajikan dalam keseluruhan dan temuan utama penelitian terdahulu

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S.H.(1986), *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (Penerjemah Al Gozie Usman), Jakarta: LP3ES.
- Alatas, Syed Hussain, (1987), *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta : LP3ES
- Isra, Saldi, (2007), *Menangani Korupsi: Model Percontohan dari Sumatera Barat-Indonesia* disampaikan dalam Siri Syarahan Umum International Institute of Public Policy and Management (INPUMA) X, Fakulti ekonomi dan Petadbiran Universiti Malaya, 28 Maret, Kuala Lumpur Malaysia)

- Perdana, Ari A. (2009), *Biaya Ekonomi dari Korupsi: Perspektif Teori dan Empiris*, Jakarta: Gramedia
- Ritzer, Goerge, (2004), *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Ritzer, George, (2012), *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rieffel, Lex dan Karaniya Dharmasaputra,(2009), *Dibalik Korupsi Yayasan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia
- Rukmana, Aan, (2009), *Korupsi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Gramedia
- Soekanto, Soerjono, (2001), *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie,(2009), *Korupsi mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia

Film Korupsi vs Kita, RUMAH PERKARA